

## BAB III

### KONSEKUENSI DAN KEBIJAKAN YANG DIPILIH TIONGGOK

Dalam bab ini akan menjelaskan konsekuensi sebagai tahap analisis ke tiga dari konsep *Rational Actors* Allison dari *Alternatives* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian dari tahap analisis tersebut akan dijelaskan kebijakan mana yang kemudian dipilih sebagai sarana untuk prinsip satu Tiongkok yang dianggap rasional dan mendekati tercapainya tujuan nasional Tiongkok.

#### 3.1 CONSEQUENCES

Dalam konsekuensi Graham T.Allison menjelaskan bahwa dalam setiap *alternatives* kebijakan pasti memiliki konsekuensi masing-masing yang terdapat dalam *Costs* dan *Benefits* yang sesuai dengan *alternatives* yang dimiliki negara (Allison, 1969).

##### 3.1.1 Melanjutkan Kerja Sama Ekonomi Antar Selat

###### A. Benefits

###### 1. Mencapai China's Peaceful Rise

Keuntungan yang didapatkan yang pertama adalah Tiongkok dipandang sebagai negara yang damai, hal ini diikuti oleh *China's Peaceful Rise*. Yang bertujuan untuk mempromosikan negaranya serta sebagai langkah untuk kebangkitan kekuatan damai Tiongkok sebagai *super power* di dunia internasional. Mengingat masalah Taiwan adalah salah satu aspek yang paling

disoroti sebagai pembuktian pandangan barat yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah negara yang selalu menggunakan kekerasan (Jianwei, 2007).

Tidak dapat dipungkiri terdapat tujuan masa depan Tiongkok yang berkaitan dengan Taiwan selain kepentingan di bidang ekonomi dan lainnya, Taiwan adalah bagian yang tidak terbantahkan sebagai salah satu isu yang dapat membuat citra Tiongkok dengan *China's peaceful rise* menurun dan tidak dapat dipercaya sehingga respon atas masalah Taiwan sangat berpengaruh untuk citra Tiongkok. Hal ini dikarenakan pentingnya *China's Peaceful Rise* dalam pandangan masa depan Tiongkok yang ingin memanfaatkan jumlah masyarakat negaranya yang begitu banyak sehingga hubungan dengan negara lain adalah salah satu jalan penyaluran yang baik untuk hal ini, diperkirakan pada 2030 populasi Tiongkok akan mencapai 1,5 miliar jiwa.

Sehingga Tiongkok sebelum mencapai tahun tersebut ingin mencapai kemaksimalan dalam persiapan reformasi, Tiongkok ingin menyediakan tenaga kerja, kretivitas, dan momentum pembangunan sebagai persiapan untuk mesin pertumbuhan dunia seperti tujuan awal dari *China's peaceful rise* untuk menjadi negara paling kuat di dunia. Zheng Bijian seorang pemikir Tiongkok mengatakan (Brookings, 2012) :

*“In this context, all our attempts to solve our development problems, whether concerning economic, political, or cultural affairs, and whether in terms of domestic, foreign, or defense policy, have been for the purpose of securing a comfortable life for China's 1.3 billion, or even 1.5 billion, people. We will never slacken our efforts to bring about a better, richer, more decent, and more humane life for our*

*people. Even when China reaches the level of a moderately developed country in the middle of the twenty-first century, we will continue to try to make further strides.”*

Lalu kaitanya dengan Taiwan tercakup dalam poin ke dua tujuan *China's peaceful rise* yang dijelaskan oleh pemerintah Tiongkok “*we must boldly draw on the fruits of all human civilization while fostering the Chinese civilization, to ensure cultural support for China's peaceful rise*”. Adanya dukungan untuk membentuk dan meningkatkan peradaban bangsa China yang mencakup Taiwan didalamnya sebagai bagian karena Tiongkok merasa Taiwan adalah bagian negaranya (Brookings, 2012). Selain itu dengan adanya kebangkitan tersebut Tiongkok ingin mengisaratkan bahwa Tiongkok ingin menghindari segala konflik termasuk dengan Taiwan dan membentuk dunia yang damai (S.Medeiros, 2004).

## 2. Sarana Komunikasi Prinsip Satu Tiongkok

Keuntungan lainya adalah dari adanya kerja sama Ekonomi antar selat kemudian menjadi wadah komunikasi antara Taiwan dan Tiongkok. Hal ini penting mengingat Tiongkok menginginkan Taiwan menerima prinsip satu Tiongkok atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu tetap pada pendirian mempertahankan status quo, yang dirasa penting dari pada status *de jure* dari Taiwan (Gov.cn, 2006).

Di sisi lain dengan adanya kerja sama ekonomi ini secara tidak langsung mendorong Taiwan untuk terus berkomunikasi dengan Tiongkok atau bernegosiasi secara damai karena dilihat bahwa Taiwan juga memiliki pandangan atas kerugian apa yang kemudian bisa didapatkan apa bila secara tiba-tiba

memutus hubungan dengan Tiongkok sehingga diplomasi prinsip satu Tiongkok sangat memungkinkan dalam ranah diplomasi kerja sama antar selat. Di prediksi Taiwan akan mengalami defisit yang tinggi jika memutuskan kerja sama dengan Tiongkok akibat tingginya ekspor Taiwan pada Tiongkok yaitu sebanyak 9,1 % bahkan sampai 23% apa bila dilihat dari intensif kerja sama antara keduanya. Yang secara tidak langsung membuat kemungkinan prinsip satu Tiongkok semakin bisa diperjuangkan (Rahmadhani, 2017).

### 3. Mendapatkan Suara Masyarakat Taiwan

Keuntungan lainnya adalah adanya kesempatan Tiongkok dalam mendapatkan suara masyarakat Taiwan, salah satunya adalah lewat kerja sama ekonomi yang merupakan cara Tiongkok untuk mempromosikan kekuatan damai. Hal ini bisa dilihat salah satunya dari pemberian bantuan Bank Huaxia dengan dana yang disediakan yaitu 8 miliar yuan atau sekitar USD 1 miliar untuk para pengusaha Taiwan, pengusaha ini juga mendapat bantuan dan kebijakan khusus lainnya, Yang kemudian memperkuat suara masyarakat Taiwan dirasa penting untuk mendorong penyatuan (Mahadeli, 2008).

Selain itu pemerintah menyatakan memberikan 31 kebijakan baru terhadap Taiwan seperti perlakuan istimewa untuk para investor, usaha teknologi dan kerja sama dan 19 kebijakan lainnya berkaitan dengan pekerjaan yang dapat di akses, tempat tinggal, tempat belajar dan memulai usaha yang inovatif disana. Selain itu masyarakat Taiwan juga dapat mengikuti ujian profesional teknis dan mengizinkan para pembuat film Taiwan untuk berkolaborasi dengan industri didalam Tiongkok (Lo, 2018).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya kebijakan Tiongkok ini dapat dilihat dari kebijakan *“three middles and the youth”* yang salah satu kebijakannya adalah dana sebesar USD 5,73 juta untuk meningkatkan interaksi negaranya dengan masyarakat Taiwan melalui beberapa program (Ya-Wei, 2017). Selain itu Tiongkok merasa dengan terjalinya kerja sama ekonomi dalam artian hubungan baik dengan masyarakat Taiwan merupakan pemulihan kembali identitas dan budaya kedua wilayah yang kemudian memunculkan suara bahwa masyarakat Taiwan mendukung untuk penyatuan wilayah dan mendorong prinsip satu Tiongkok (Chai, 2018).

#### 4. Keuntungan Depedensi

Kerja sama ekonomi antar selat itu menguntungkan Tiongkok dari segi depedensi, terutama atas keinginan Tiongkok mengikat secara ekonomi. Maka dari itu banyaknya pengusaha Taiwan yang tertarik mengembangkan perusahaan mereka di wilayah Tiongkok kemudian menjadi keuntungan tersendiri, dalam hubungan ekonomi keduanya terdapat sebuah istilah yang disebut dengan demam Tiongkok yaitu istilah untuk pengusaha Taiwan yang begitu tertarik dengan pasar Tiongkok dan melakukan investasi besar-besaran yang semula hanya 10 persen menjadi 80 persen. Sehingga keuntungan yang yang diterima Tiongkok sebagai keterikatan Taiwan jauh lebih besar dan dapat mencapai prinsip satu Tiongkok (Chiang & Gerbier, 2013).

Pada saat Taiwan mengalami krisis seperti penurunan ekspor sebanyak 34 persen pada 2009. Hal ini dianggap penurunan yang drastik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain itu jumlah turis, konsumsi, investasi dan yang

lain juga ikut menurun. Tiongkok kemudian mengambil bagian yang semakin mudah membuat Taiwan bergantung dan bernegosiasi atas prinsip satu Tiongkok yang kemudian Tiongkok datang sebagai penyelamat dan penopang ekonomi Taiwan. Pada saat pemerintahan Ma Taiwan mulai lebih erat dengan Tiongkok walaupun hal ini diiringi dengan kemungkinan ketergantungan Taiwan tidak memiliki pilihan lain karena Tiongkok terlalu menjanjikan untuk ditinggalkan sebagai jalan perbaikan kondisi ekonomi (Wakefield, 2009).

## B. Costs

### 1. Taiwan Bukan Pasar Yang Menguntungkan

Walaupun Tiongkok memiliki keuntungan sekitar USD 5 miliar atas ekspor pada Taiwan dalam kurun waktu 1990-an. Kemudian meningkat pada 2001 menjadi USD 25 miliar dan terus meningkat 21% pada kurun waktu 2000-2009. Tiongkok dikatakan dalam posisi yang tidak menguntungkan jika dilihat negara mana yang lebih mendapatkan keuntungan akibat dari ketidak seimbangan Taiwan yang hanya mengekspor bahan mentah ke Tiongkok. (Peterson Institute for Internasional Economic, 2010). Dalam data lain pada 1990-an angka ekspor Taiwan atas Tiongkok pada angka USD 6,9 miliar dan Taiwan pada tahun 2000-an mencapai angka USD 26.1 miliar, dalam hal ini pandangan yang dilihat adalah pasar Tiongkok yang merugi karena harus menyediakan akses untuk Taiwan (N.H.Chen, 2003).

Taiwan sebagai pasar Tiongkok sebenarnya sangat tidak menguntungkan, dari total ekspor Tiongkok hanya 2 % pada Taiwan setelahnya tidak adanya peningkatan yang signifikan atas perkembangan pasar ini (Min Hua Chiang,

2013). Maka dari itu Taiwan harusnya tidak benar-benar menjadi tujuan utama pasar Tiongkok namun tetap dipentingkan mengingat adanya kebijakan seperti tarif khusus dan ECFA. Kerugian lain adalah Tiongkok harus benar-benar merelakan wilayahnya untuk diberikan secara mudah pada pengusaha Taiwan. Selain itu Tiongkok dalam sebuah jurnal dikatakan mengalami kerugian USD 20 miliar setiap tahun atas setiap program untuk pengusaha Taiwan, padahal bisa dikatakan Tiongkok berkemungkinan mencari pasar yang lebih baik (Roy, 2004).

### **3.1.2 Melanjutkan operasi militer**

#### **A. Benefits**

##### **1. Taiwan Menyerah Secara Militer**

Keuntungan yang paling memungkinkan dalam penggunaan militer adalah wilayah Taiwan yang bisa didapatkan dan dipaksa menyerah walaupun dengan biaya yang mahal, dikatakan bahwa terdapat kemungkinan Taiwan tidak dapat mengalahkan pasukan PLA Tiongkok di medan perang konvensional. Taiwan kemudian dituntut untuk meningkatkan anggaran militer untuk mempersiapkan segala keperluan militer seperti bom untuk menghalau kapal PLA mengangkut pasukan ke selat Taiwan, persiapan angkatan laut, udara, rudal, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghalau Tiongkok. Namun dikatakan usaha Taiwan tidak dapat menangkal semua serangan Tiongkok disebabkan aset intelejen yang lebih besar di Tiongkok serta kemampuan untuk melakukan sabotase di situs-situs militer (Cole, 2019).

Dalam mamahami apakah kapasitas Taiwan tidak dapat menghalangi Tiongkok dapat dilihat dari perbandingan kapasitas militer yang dimiliki kedua

wilayah. Hal ini dapat diamati di *Global Fire Power (GFP)* yang sejak 2006 memberikan analisa data militer setiap negara di dunia sekaligus mendata senjata konvensional. Dari GFP sejak 2010 Tiongkok selalu menempati posisi ke 3 setelah Amerika dan Rusia yang pada 2019 posisi Tiongkok tetap sama sedangkan Taiwan di posisi ke 22 dari negara lainnya (Global Fire Power, 2006).

**Tabel 3.1. Data Perbandingan Kapasitas Militer Tiongkok dan Taiwan**

<b>Kapasitas 2019</b>	<b>Tiongkok</b>	<b>Taiwan</b>
Total Populasi	1.384.688.986	23.545.963
Total Populasi Layak Ikut Perang	752.855.402	12.196.809
Total Personil Militer	2.693.000	1.890.000
Personil Aktif	2.183.000	215.000
Personil Cadangan	510.000	1.675.000
Penembak	1.222	286
Penyerang	1.564	286
Transportasi	193	19
Total Helikopter	1.004	335
Tank Tempur	13.050	1.855
Roket	2.050	115

Sumber : (Global Firepower, 2019)

Dari data diatas kemudian dapat dipahami bahwa kondisi militer Taiwan dari Tiongkok bisa dikatakan sangat jauh, yang kemudian jika keduanya mengalami konflik militer maka terdapat kemungkinan Tiongkok dapat lebih unggul dan apa bila strategi blokade 103 kawasan sekitar Taiwan digunakan maka



tidak akan ada negara yang dapat membantu Taiwan. Sehingga kedua wilayah hanya dapat menggunakan kekuatan masing-masing (Lanoaszka, 2018).

## B. Costs

### 1. Besarnya Dana Yang Dikeluarkan

Kerugian yang pertama tentu saja tidak terlepas dari penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam usahanya menggunakan kekuatan militer dalam mencapai prinsip satu Tiongkok. Terlebih tidak ada iktikat dari Taiwan untuk menerima prinsip tersebut setelah tindakan militer yang dapat diartikan biaya yang dikeluarkan selama ini terbilang percuma walaupun pengeluaran meningkat (VOA, 2018). Dalam *China's White Paper* yang dikeluarkan oleh Tiongkok pada 2010 menjelaskan bahwa anggaran militer Tiongkok pada 2008 adalah USD 31.404,5 miliar menjadi USD 34.090,3 miliar pada 2009 (Cordesman, 2016).

Banyak yang mengatakan termasuk profesor ilmu politik di universitas Tongji Shanghai. Bahwa yang dapat membuat anggaran keamanan Tiongkok menurun apa bila kekuatan Ekonomi negaranya juga ikut menurun. Hal itu akan terjadi secara otomatis karena tidak mungkin memaksakan peningkatan yang memerlukan pendanaan yang sangat besar (Blanchard, 2019).

Kementrian pertahanan Tiongkok mengatakan akan terus mengeluarkan biaya untuk keperluan defensif yang dikatakan dapat terus mendukung citra Tiongkok yang kuat, namun di satu sisi kekuatan Tiongkok yang terus bertambah membuat negara disekitarnya merasa tidak aman dalam artian justru akan

menimbulkan ketidak amanan dunia atas militer Tiongkok yang semakin dilengkapi dengan senjata dan pasukan yang kuat (David Lague, 2019) .

Pengeluaran juga akan semakin meningkat karena adanya bantuan militer yang diberikan AS ke Taiwan, seperti sistem pertahanan rudal canggih yaitu radar Aegis dan PAC-3 selain itu menjual kapal perusak pada Taiwan dengan kemampuan pertahanan rudal yang sama dan masih terdapat peralatan militer lainnya (The New York Times, 2001).

Tiongkok melihat penggunaan kekuatan militer sudah tidak efektif lagi mengingat AS adalah negara yang paling aktif mendukung Taiwan, selain itu hal ini akan menimbulkan dilema keamanan, hubungan AS dan Taiwan tertuang dalam naungan *Taiwan Relations Act* (TRA) AS dan Taiwan melakukan hubungan perdagangan termasuk penyediaan senjata oleh AS. Selain itu terdapat *Joint Defense Capabilities Assessment* (JDCA) sebagai wadah AS memberikan perlengkapan pertahanan pada Taiwan (American Institute in Taiwan, 1979).

Namun dalam melihat hal ini diperlukan juga melihat bagaimana kondisi Taiwan dalam melihat seberapa efektif operasi militer Tiongkok dalam masalah prinsip satu Tiongkok, Taiwan sendiri cukup melakukan perlawanan seperti merancang kerja sama Taiwan-AS dalam mengumpulkan aliansi perang melawan Tiongkok seperti terbentuknya proyek *2049 institute* yang sekaligus merangkum pernyataan AS yang ingin memberikan dana yang besar untuk militer Taiwan. Selain itu dalam usaha mandiri terdapat *Overall Defense Concept* (ODC) Taiwan yang merupakan konsep penyerangan asimetris yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan keunggulan dari pertahanan militer dalam negeri terlepas

Taiwan tetap bekerja sama dengan AS untuk senjata dan peralatan pelatihan lainnya (Bierman, 2018).

Perjanjian keamanan AS dengan Taiwan ada sejak tahun 1954 dan UU hubungan keduanya disahkan pada 1979 yang mengartikan komitmen AS sebagai aliansi dalam membantu Taiwan merdeka sudah sejak konflik wilayah Taiwan dan Tiongkok menjadi isu internasional. Pada tahun pertama masa pemerintahan presiden Obama AS mengirim dana sebesar USD 12 miliar untuk peningkatan militer Taiwan dan penjualan senjata keduanya semakin tinggi. Fasilitas lain yang diberikan adalah peralatan militer seperti 1.200 rudal balistik dan rudal jelajah dan masih banyak bantuan lainnya (Bush, 2016). Sehingga tidak mudah memprediksi secara pasti apakah Tiongkok kemudian mutlak menang dalam peperangan mengingat AS dan Tiongkok sama-sama memiliki militer yang baik.

Keterlibatan AS dalam masalah ini memaksa Tiongkok untuk berpikir dua kali untuk terus dengan kekuatan militer dan terus mengeluarkan biaya sebab dengan adanya AS dapat menciptakan dilema keamanan. AS kemudian tidak hanya canggih secara militer dalam membantu Taiwan tetapi juga unggul dalam kekuatan militer konvensional terkait pasukan (Lanoaszka, 2018).

## 2. Kecaman Internasional

Dalam masalah ini Tiongkok mendapatkan kecaman internasional sebagai negara yang menggunakan tindakan agresif atas kepentingannya di Taiwan, pandangan ini terus melekat selama Tiongkok menggunakan militernya atas Taiwan. Taiwan juga dapat terus menyuarakan agar wilayah mereka dibantu dan

didukung atas perlakuan tidak baik Tiongkok pada wilayahnya. Maka dari itu Tiongkok kemudian bisa menjadi negara yang dianggap tidak baik di dunia internasional yang dapat memberikan dampak buruk pada masa depan negaranya. Selain itu negara lain berkemungkinan mendukung Taiwan dalam hal ini terutama dengan adanya kampanye disinformasi untuk menarik perhatian negara demokrasi dalam menanggapi tindakan militer Tiongkok (White, 2019).

Dari tindakan militernya terhadap Taiwan pengiringan opini bisa saja terjadi, di mana Tiongkok dikatakan sebagai ancaman bagi negara-negara di dunia apabila tindakan militer atas Taiwan dilakukan, maka dalam kesempatan dan kasus yang berbeda Tiongkok dianggap dapat melakukan hal yang sama terhadap negara lain. Terlebih pandangan bahwa Tiongkok bukanlah negara demokrasi memperkuat kecaman atas negaranya. Maka dari itu tindakan militer Tiongkok dikecam karena bisa berdampak pada dunia yang tidak damai, sehingga Tiongkok harus dibatasi demi mencapai ketertiban dunia, maka konsekuensi ini bisa didapatkan dari penggunaan militer (Perdana, 2018).

Terlebih pandangan-pandangan barat yang terus mengkaitkan bahwa masalah yang menonjol dari Tiongkok ialah masalah Taiwan yang begitu diperhatikan. Dengan negara tersebut mengatasi Taiwan di ranah militer maka Tiongkok akan terus dipandang sebagai negara yang buruk. Pandangan yang demikian juga diiringi dengan kecaman dan komentar-komentar bahwa Tiongkok adalah negara yang agresif, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga berdampak pada bagaimana suatu negara lain kemudian memandang Tiongkok dan

mempertimbangkan kerja sama. Yang paling buruk kemudian berpengaruh pada kekuatan hegemoni yang diinginkan Tiongkok (Jianwei, 2007).

**Tabel.3.2 Costs dan Benefits Usaha Tiongkok Dalam Mencapai Prinsip Satu Tiongkok**

Alternatives	Costs	Benefits
Melanjutkan Kerja Sama Ekonomi Antar Selat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan yang tidak seimbang antara keduanya</li> <li>• Cenderung menguntungkan Taiwan</li> <li>• Kerugian 20 miliar setiap tahunnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkemungkinan memenangkan hati masyarakat Taiwan-masa akan mendorong menyatuan</li> <li>• Mempertahankan status quo sekaligus sebagai wadah</li> <li>• Sesuai dengan <i>China's Peaceful Rise</i> – membangun cinta baik di ranah internasional</li> <li>• Keuntungan dalam depedensi</li> </ul>
Melanjutkan Operasi Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap tidak efektif dan merusak citra internasional Tiongkok karena ada <i>China's Peaceful Rise</i></li> <li>• Mengeluarkan biaya yang terlalu mahal terutama bergabungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap dapat membuat Taiwan menyerah secara langsung atas penyatuan</li> </ul>

	AS mendukung Taiwan	
	• Kecaman internasional	

### 3.2 CHOICE

Dalam pidato presiden Hu Jintao pada saat upacara peringatan 30 tahun perubahan kebijakan utama daratan di Taiwan (Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, 2018) :

*"The mainland proposed to end the military confrontation across the Taiwan Straits Through dialogues and welcomed exchanges between the two sides, all those who had advocated or got involved in secessionist activities or followed suit are welcome to return to the right direction of promoting peaceful development of cross-Straits ties, We expect to normalize economic relations across the Straits and establish an economic cooperation mechanism"*

Dalam peringatan 30 tahun upaya non-konfrontatif Tiongkok terhadap Taiwan, presiden Hu sendiri memberikan proposal penting dalam mendukung hubungan keduanya. Selain proposal mengenai usaha dalam memperkuat hubungan budaya, membicarakan kembali keterlibatan Taiwan dalam dunia internasional, yang ikut ditekankan juga adalah mengenai masalah kerja sama ekonomi yang harus segera dilakukan demi hubungan keberlanjutan. Proposal ini juga salah satunya untuk menyurakan gencatan senjata diplomatik, pidato Hu

dianggap sangat berdampak pada kedamaian di kedua selat dan dianggap langkah yang cerdas untuk membuat Taiwan lebih dekat (Harris, 2009).

Proposal damai tersebut berisikan enam poin oleh Hu Jintao sebagai pemimpin Tiongkok sekaligus sebagai pemimpin dalam partai komunis China (PKC) pada saat itu, hal ini juga sekaligus sebagai responya atas prinsip satu Tiongkok dan menegosiasikan pendekatan yang lebih fleksibel serta pragmatis terkait dengan hubungan lintas selat, Adapun enam poin oleh Hu yaitu (Hsiao, 2009) :

1. Taiwan harus melihat prinsip satu Tiongkok sebagai suatu yang utama
2. Taiwan dan Tiongkok harus terus melakukan negosiasi ekonomi dalam bentuk kerja sama
3. Menegosiasikan perjanjian damai
4. mempromosikan pertukaran personel
5. membicarakan kembali partisipasi Taiwan dalam dunia global
6. menekankan hubungan budaya yang sama antara kedua selat

Kerja sama ekonomi antar selat Tiongkok adalah kebijakan jangka panjang yang difokuskan oleh negara tersebut sebagai kebijakan utama dari negaranya karena bersifat damai dan dirasa dapat beriringan dengan kebijakan wajah baru Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari *China's National Defence 2010* yaitu prinsip satu Tiongkok ingin diraih secara damai dengan peningkatan *Mutual*

*Trust* (Ministry of National Defence, 2017). Kemudian jika dibandingkan dengan alternatif lain yaitu melanjutkan kebijakan operasi militer maka kerugian yang dialami cenderung lebih besar.

Kerjasama ekonomi antar selat dirasa dapat mencapai tujuan prinsip satu Tiongkok dalam jangka waktu yang lama, Tiongkok mengatakan bahwa adanya kerjasama antar selat salah satunya dibentuknya ECFA pada 2010 merupakan usaha untuk mendorong Taiwan masuk kedalam gelombang regionalisasi yang berpusat pada Tiongkok. Negara ini berpandangan bahwa pasar adalah yang terpenting dalam penyediaan menjalin kerjasama dengan Tiongkok, dan menjadi cara yang menarik untuk Taiwan. Jika berbicara kondisi Taiwan saat ini maka Tiongkok mengambil bagian dalam pemanfaatannya karena Taiwan dalam dekade terakhir mengalami deindustrialisasi ketika banyaknya perpindahan aktifitas industri ke Tiongkok (Chiang & Gerbier, 2013).

Dikatakan bahwa sektor jasa menyumbang 70 persen dari PDB Taiwan sedangkan industri hanya 29 persen. Hal ini menurun pada saat 1980an masa industri Taiwan, industri menyumbang 40 persen dari PDB, sebelumnya industri dalam wilayah menarik banyak tenaga kerja asal namun saat ini industri menurun dan bisa menyebabkan masalah lain dalam wilayahnya, sedangkan pasar Taiwan yang cenderung kecil semakin lama tidak dapat menopang ekonomi yang ada di era persaingan yang semakin ketat. Di mana sektor jasa tidak mampu menggerakkan ekonomi. Maka dari itu kerjasama ekonomi dalam pandangan Tiongkok adalah cara damai jangka panjang yang suatu waktu dapat mencapai



prinsip satu Tiongkok dalam negosiasinya, selain itu untuk memanfaatkan kondisi Taiwan (Chiang & Gerbier, 2013).

Tidak bisa dipungkiri bahwa tigitan Tiongkok di jalur damai merupakan bentuk dari kebijakan lain yang ikut terkait yaitu *China's peaceful rise* yang mulai disuarakan sejak 2003 (Pan, 2006). yang mengutamakan perjanjian perdagangan bebas aktif yang target utamanya adalah negara-negara di Asia tanpa terkecuali Taiwan. Tiongkok diyakini sangat berhati-hati dalam mengubah pandangan bahwa Tiongkok adalah negara yang selalu menggunakan kekuatan militer. Target utama dalam misi ini adalah terbentuknya dunia yang harmonis dengan Tiongkok sebagai kekuatan besar didalamnya (Wang V. W.-C., 2007).

Tiongkok dikatakan telah mengabungkan diplomasi regional dengan kebijakan ekonomi, yang memiliki efek dapat menekan adanya perselisihan, mempererat hubungan dengan organisasi maupun wilayah tertentu dan memperkuat hubungan dagang. Strategi ini kemudian juga ikut digunakan di Taiwan sebagai wilayah yang penting bagi Tiongkok. Walaupun tujuan utama dalam kebangkitan damai ini adalah adanya pandangan dari Tiongkok untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi, namun Taiwan adalah negara pembuktian bahwa Tiongkok tidak egois dan tetap lembut kepada siapapun yang ingin menjalin kerja sama dengan negaranya, sehingga hal ini tidak terlepas dari ingin memenangkan hati Taiwan dengan cara yang sama dan mewujudkan prinsip satu Tiongkok (Pan, 2006).

Selain kebangkitan damai Tiongkok yang ikut dipertimbangkan kembali pada akhir peperangan dengan Taiwan pada 2010 lalu, yang kemudian mendorong kerja sama ekonomi Tiongkok kemudian menjadi alternatif dalam masalah prinsip satu Tiongkok karena pada saat operasi militer Taiwan masih tetap dalam kondisi yang sama tidak ingin menerima prinsip satu Tiongkok bahkan sampai dengan saat ini, presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan (Yang, 2019).

*“ The island's "unification" with China was not possible under the "one country, two systems" model “*

Tiongkok mengatakan Taiwan tetap pada pendiriannya sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan kekuatan militer sehingga cara damai adalah cara yang diutamakan dan alternatif selain jalur operasi militer, pemerintah Tiongkok mengatakan *“one country, two systems” approach that would ensure “the interests and well-being of Taiwanese compatriots”* (Yang, 2019).

**Tabel 3.3 Usaha Tiongkok Dalam Mencapai Prinsip Satu Tiongkok dengan Rational Actor Models**

<i>Action as Rational Choice</i>	<b>Penjelasan Graham Allison</b>	<b>Tiongkok Terhadap Prinsip Satu Tiongkok Terhadap Taiwan</b>
Goal and Objectives	Dalam hal ini aktor mempertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi dari tujuan negaranya	Tujuan Tiongkok terhadap Taiwan dalam penyatuan wilayah : Faktor yang mendorong yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goals : kepentingan penyatuan wilayah ( prinsip satu Tiongkok ), perkembangan</li> </ul>

		<p>ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectives : mempertahankan status quo, mendapatkan suara masyarakat Taiwan.</li> </ul>
Alternatives	<p>Aktor menempatkan beberapa pilihan kebijakan yang spesifik sesuai dengan kondisi negara sehingga dari pilihan tersebut akan berbeda satu sama lain dan akan dipilih yang paling tepat yang mendekati tujuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan kerja sama ekonomi antar selat : cara damai setelah tindakan militer dianggap terlalu agresif dan tidak sesuai dengan <i>China's peaceful Rise</i> yang mementingkan cara damai melalui kerja sama ekonomi</li> <li>Melanjutkan operasi militer : merebut Taiwan secara langsung yang bisa saja melibatkan AS</li> </ul>
Consequences	<p>Pada setiap varian alternatif memilih keuntungan dan kelebihan masing-masing sehingga akan dipilih yang paling tepat untuk tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan kerja sama ekonomi antar selat : <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Benefits</i>: masyarakat berkemungkinan mendukung penyatuan atas kebaikan hati Tiongkok dalam kebijakan ekonomi</li> <li>Mempertahankan status quo dari pada kemerdekaan</li> </ul> </li> </ol>

		<p>Taiwan namun tetap bernegosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu terwujudnya <i>China's Peaceful Rise</i></li> <li>• <i>Costs</i> : Keuntungan yang tidak seimbang</li> </ul> <p>2. Melanjutkan operasi militer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benefits</i> : secara langsung diprediksikan dapat merebut Taiwan dengan kekuatan Tiongkok</li> <li>• <i>Costs</i> : merusak citra internasional Tiongkok yang mulai muncul dengan kebangkitan damai</li> <li>• Mengeluarkan banyak biaya karena terdapat AS</li> </ul>
Choice	<p>Kebijakan apa yang akhirnya di pilih oleh aktor dari beberapa alternatif setelah dipertimbangkan konsekuensi apa yang mendekati tujuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Choice</i>: kerja sama ekonomi antar selat</li> <li>• Alasan :</li> </ul> <p>Memiliki keuntungan yang lebih banyak dan kerugian yang tidak terlalu merugikan negara dan sesuai dengan tujuan Tiongkok dan kebangkitan damai negaranya</p>

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pilihan Tiongkok yaitu kerja sama ekonomi sebagai salah satu alternatif dari Tiongkok dalam masalah konflik wilayah dan kaitannya dengan prinsip satu Tiongkok. Pada pembahasan dari penelitian ini kemudian mengarah pada pemilihan kerja sama ekonomi antar selat sebagai pilihan Tiongkok yang dirasa sesuai dengan kondisi negara serta konsekuensinya paling mendekati tujuannya dari prinsip satu Tiongkok yang merupakan tujuan nasional negara tersebut. Pada tahap alternatif dapat di pahami bahwa kerja sama ekonomi memiliki konsekuensi yang paling bisa ditangani dari segi kerugian dan segi keuntungan jangka panjang Tiongkok dan kaitannya dengan kebangkitan damai Tiongkok di dunia internasional serta keuntungan lainnya, maka dari itu kebijakan penanganan pertama pada 2010 dalam masalah ini adalah bidang ekonomi.

